

**ANALISA HUKUM TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PERANGKAT DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DI LOMPPIO KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN
DONGGALA**

KRISYOHAN / D 101 08 424

ABSTRAK

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat desa dan Pelayanan. Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Teknik Analisa Bahan Hukum yang digunakan yaitu data-data yang dikumpul disusun secara kualitatif kemudian memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan, sehingga mendapatkan suatu kebenaran dengan menguraikan bahan hukum yang sudah terkumpul dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perangkat desa Lompio dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen Perangkat desa untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya. Kemudian Perangkat desa Lompio lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan masyarakat pengguna jasa. Perangkat desa Lompio kadang tidak merasa bertanggungjawab kepada masyarakat, melainkan bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasannya, sehingga pelayanan yang dilakukan perangkat desa Lompio belum berjalan secara maksimal.

Kata Kunci : Tugas Pokok, Fungsi, Perangkat Desa dan Pelayanan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan arah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap daerah diberi kewenangan dan dituntut untuk meningkatkan kemandirian daerah baik dalam hal keuangan maupun kualitas sumber daya

manusianya.¹ Pemerintah daerah harus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran sumber daya aparatur diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dalam

¹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan desa mempunyai Jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan perasarana pemerintah.² Sebagai salah satu unit terkecil dalam pemerintahan sebuah negara, pemerintahan desa memegang peranan yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebab pelayanan prima merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, pemerintahan desa harus didukung oleh perangkat-perangkat yang handal atau akuntabel. Perangkat yang handal atau akuntabel merupakan perangkat desa yang memahami dan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sesuai dengan bidang

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Disamping itu, mereka tentu harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sesuai dengan bidang tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Disamping itu, mereka tentu harus memiliki komitmen dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Analisa Hukum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala?

II. PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan desa

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³

Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Dalam penjelasan resmi UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

³*Ibid*

berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Untuk itu Setiap undang-undang dasar mempunyai maksud, yang mengutarakan tujuan Negara. Dalam setiap konstitusi ada tercantum bahwa tujuan Negara adalah untuk memelihara dan untuk mengembangkan kesejahteraan serta keselamatan warganegaranya.⁴ Maksud dari UUD 1945 dilihat dalam pembukaan alinea ke 4 :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁵

Bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan dan dalam penyelenggaraan Negara berdasarkan prinsip demokrasi, maka tugas dan urusan Negara sebagian diberikan pada masing-masing daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Pembagian daerah dalam rangka desentralisasi diamanatkan

Dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- (1) Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang
- (2) Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.⁶

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menggunakan istilah dibagi atas bukan terdiri atas, ini dimaksudkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang utuh dan kemudian dibagi menjadi tiap-tiap daerah provinsi dan kabupaten agar lebih tercapainya tujuan demokrasi bangsa. Olehnya itu tugas dan

tanggung jawab Negara tidak bertumpuh pada pemerintah pusat saja, melainkan diberikan kepada masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten, kota dan desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif (*administrative entity*), tetapi sebagai entitas hukum (*legal entity*), yang berarti harus di hargai, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini terkait dengan konsep Indonesia mengenai hubungan antara manusia yang tidak sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan (*brotherhood*), tetapi meliputi pula hubungan antara manusia dan sekaligus sebagai pribadi dalam masyarakat (komunitas), sehingga kaitannya menjadi lebih luas, yakni persaudaraan dan kekeluargaan. Berkaitan dengan pelayanan di pemerintahan desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan jalur atau mekanisme apapun yang paling memadai.

Berbicara pelayanan perangkat desa, tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan layanan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan demikian, terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas pemberian layanan juga tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku dalam pelayanan secara umum. Dalam penyelenggaraan pelayanan tertentu di desa, ada kalanya merupakan bagian dari rangkaian pelayanan oleh pemerintah daerah. Sebagian besar pelayanan di desa pada dasarnya merupakan kelompok layanan yang bersifat administratif misalnya surat keterangan lahir dari kepala desa untuk syarat pengurusan akta kelahiran, pengesahan kepala desa dalam blangko formulir untuk pengurusan KTP, pernikahan, penerimaan wesel, dan lain-lain. Pemberian surat keterangan untuk memperoleh Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian, penerbitan surat keterangan penjualan hewan, dan surat-surat sejenis lainnya juga merupakan bentuk-bentuk layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa.

C. Pengangkatan Perangkat Desa

⁴Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Universitas Ekasakti Padang, 1987, Hlm 33

⁵Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya, Belabook Media, 2010.

⁶*Ibid*

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pasal 49 disebutkan bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

D. Larangan Perangkat desa

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

E. Sanksi Perangkat Desa

Pasal 52 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, sanksi perangkat desa yaitu:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

F. Pemberhentian Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Pasal 53 pemberhentian perangkat desa sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa

Tugas pokok dan fungsi yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh perangkat desa sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya dalam struktur organisasi pemerintahan desa. Adapun jenis-jenis pelayanan yang dilakukan perangkat Desa Lompio terdiri dari pelayanan dalam administrasi kependudukan, dan pelayanan administratif.

Pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan adalah berupa pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), proses surat pindah datang serta pembuatan akta kelahiran. Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Pemerintah Desa hanya sebagian saja dari pelayanan administrasi kependudukan secara utuh, karena di luar Pemerintah Desa terdapat pula pelayanan administrasi kependudukan oleh organisasi Rukun Tetangga (RT), organisasi Rukun Warga (RW), Pemerintah Kecamatan dan berakhir di tingkat Pemerintah Kabupaten Donggala yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Pelayanan administratif adalah berupa pelayanan pembuatan Surat Kelakuan Baik, Surat Perjalanan bagi warga yang berkepentingan akan bepergian ke luar daerah dan surat-surat lain dalam lingkup pelayanan administratif. Selanjutnya berkenaan dengan apakah perangkat Desa Lompio melakukan perbedaan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut:

- a) Dalam pelayanan kependudukan dan pelayanan administratif. Perangkat desa

Lompio tidak melakukan perbedaan pelayanan terhadap Masyarakat dalam arti semua masyarakat sama.

- b) Dalam pelayanan yang di berikan oleh Perangkat desa Lompio kepada masyarakat tidak adanya perbedaan antara masyarakat. Disamping itu Perangkat desa dan masyarakat desa dalam membangun desa Lompio semuanya kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan indah.

Kondisi seperti ini sangat baik untuk pelayanan yang dilakukan Perangkat desa Lompio dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya kesamaan hak diantara para pengguna layanan, ditinjau dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan sebagainya.

Kemudian hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa Dalam hal pelayanan kependudukan dan pelayanan administratif, Pemerintah Desa Lompio tidak memberikan perbedaan pelayanan kepada warga dalam hal ini warga asli dan warga pendatang. Hal ini sejalan dengan salah satu kriteria kualitas pelayanan perangkat desa, sebagaimana telah disebutkan baik secara teori maupun dalam implementasi Peraturan - Perundangan, yang berarti pula telah memenuhi kriteria *good governance*.

Dari segi analisa hukum, Negara itu merupakan sistem kaidah yang menata kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Suatu organisasi Negara mendapat pembenaran atau legitimasi dengan adanya pengakuan dari rakyat. Negara menatur dan menata kehidupan rakyat disegala bidang.⁷

H. Upaya Perangkat Desa Lompio Dalam melayani Masyarakat

Perangkat desa Lompio dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kinerja yang baik. Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau

⁷Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm.181

program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, Visi dan Misi desa lompio.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinir kepentingan orang dalam masyarakat. Kepentingan yang bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.⁸

Pemerintahan desa menjadi perhatian, tidak hanya karena keaneragaman istilah yang digunakan, berbeda isi, susunan dan masyarakatnya tetapi dilihat dari sudut hukum tetap menarik untuk dibahas. Republik kesatuan ini tidak akan berdiri seandainya perjuangan untuk menegakan kemerdekaan tidak didukung oleh rakyat di desa.⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat desa Lompio, dalam memberikan pelayanan kepada belum berjalan secara maksimal. Agar pemerintahan desa lompio dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kontrol dari masyarakat. Secara konsep Hukum Adminitrasi Negara kontrol rakyat sebagai suatu proses aktif dimana rakyat mengawasi perilaku pemerintah. Analisa hukum menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki penguasa bukanlah segalanya.¹⁰

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa hukum yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, disimpulkan sebagai berikut:

Perangkat desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perangkat desa Lompio dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan masyarakat pengguna jasa. Perangkat desa Lompio kadang tidak merasa bertanggungjawab kepada masyarakat, melainkan bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasannya, sehingga pelayanan yang dilakukan perangkat desa Lompio belum berjalan secara maksimal.

B. Saran

Kepada perangkat desa Lompio diharapkan dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga tata pemerintahan desa Lompio dapat berjalan dengan baik.

Kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Donggala perlu dilakukan pelatihan kepada perangkat desa Lompio mengenai pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepada masyarakat desa Lompio hendaknya melakukan kontrol kepada perangkat desa Lompio. Karena dengan adanya kontrol masyarakat mengenai jalannya pemerintahan desa maka diharapkan perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

⁸Mudjiono, *Sistem Hukan Dan Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1997, Hlm. 8

⁹Moh. Kusnadi Dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 1981, Hlm.285

¹⁰Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2002, Hlm. 25

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Universitas Ekasakti Padang, 1987.
Mudjiono, *Sistem Hukun dan Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1997.
Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 1981.
Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2002.
Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

KRISYOHAN, Lahir di, Alamat Rumah Jalan
....., Nomor Telepon +62....., Alamat Email
.....

